



The Effect Of Local Government Expenditure And Economic Growth On The Poverty Rate In North Sumatra Province

Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara

Rania Rizqi Ananda ¹⁾; Miftha Rizkina ²⁾

^{1,2)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ raniarzand@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [25 Maret 2026]

Revised [27 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Local Government Expenditure,
Economic Growth, Poverty
Rate.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara periode 2020–2024. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan, artinya peningkatan belanja pemerintah daerah dapat menurunkan kemiskinan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan, kedua variabel independen mampu menjelaskan variasi tingkat kemiskinan sebesar 89,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas alokasi anggaran pada sektor produktif dan program sosial.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of local government expenditure and economic growth on the poverty rate in North Sumatra Province during the 2020–2024 period. The data used were secondary data obtained from the Statistics Indonesia (BPS) of North Sumatra Province and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The analytical method applied was multiple linear regression. The results showed that partially, local government expenditure had a significant negative effect on the poverty rate, meaning that an increase in government expenditure could reduce poverty. Meanwhile, economic growth had no significant effect on the poverty rate. Simultaneously, both independent variables explained 89.7% of the variation in the poverty rate, while the remaining percentage was influenced by other factors outside the model. This study concludes that local government expenditure plays an important role in poverty alleviation in North Sumatra Province. Therefore, the government should improve budget allocation effectiveness in productive sectors and social programs.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi yang masih dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara. Tingkat kemiskinan tidak hanya mencerminkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya. Oleh karena itu, penurunan angka kemiskinan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah.

Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki dinamika tingkat kemiskinan yang cukup fluktuatif. Pada masa pandemi COVID-19, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan akibat melemahnya aktivitas ekonomi, menurunnya pendapatan masyarakat, serta terbatasnya kesempatan kerja. Namun, seiring proses pemulihan ekonomi, angka kemiskinan mulai menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Belanja pemerintah daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program perlindungan sosial. Pengalokasian anggaran yang tepat sasaran diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor penting karena peningkatan output daerah dapat

mendorong kenaikan pendapatan masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu secara otomatis menurunkan kemiskinan apabila distribusi pendapatan tidak merata.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Sebagian penelitian menemukan bahwa belanja pemerintah berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak selalu memberikan dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut, khususnya pada konteks daerah dan periode waktu yang berbeda.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara periode 2020–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur ekonomi publik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Menurut Todaro dan Smith (2020), kemiskinan menunjukkan ketidakmampuan individu memenuhi standar hidup minimum yang layak. Salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan kemiskinan adalah melalui belanja pemerintah daerah, yaitu pengeluaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program sosial. Halim (2021) menyatakan bahwa belanja daerah memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga berperan penting karena peningkatan output daerah dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Sukirno, 2019). Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak langsung pada penurunan kemiskinan apabila manfaatnya tidak tersebar merata. Kuznets menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi sering diikuti peningkatan ketimpangan pendapatan (Todaro & Smith, 2020). Penelitian Siregar dan Lubis (2022) menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Meiriza et al. (2024) juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu menurunkan kemiskinan secara nyata di Sumatera Utara. Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara periode 2020–2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan studi empiris berbasis data sekunder time series periode 2020–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Variabel independen terdiri atas belanja pemerintah daerah yang diukur dari total realisasi APBD dan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, sedangkan variabel dependen adalah tingkat kemiskinan yang diukur dari persentase penduduk miskin. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan persamaan $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi agar model memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (Gujarati & Porter, 2019). Pengolahan data menggunakan software IBM SPSS Statistics 25 pada komputer berbasis Windows. Uji hipotesis dilakukan melalui uji t untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk melihat kemampuan model menjelaskan variabel dependen dengan tingkat signifikansi 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara periode 2020–2024. Secara parsial, variabel belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan arah koefisien negatif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan



belanja pemerintah daerah mampu menurunkan tingkat kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta pelaksanaan program sosial yang lebih efektif. Sementara itu, variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dampaknya terhadap penurunan kemiskinan masih terbatas.

Secara simultan, belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan variasi tingkat kemiskinan sebesar 89,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini sejalan dengan teori Keynes yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan di Sumatera Utara. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas alokasi anggaran pada sektor produktif, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat agar pertumbuhan ekonomi yang tercipta menjadi lebih inklusif dan berdampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan.

Melaporkan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk time series tahunan yang dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda.

Uji Asumsi Klasik

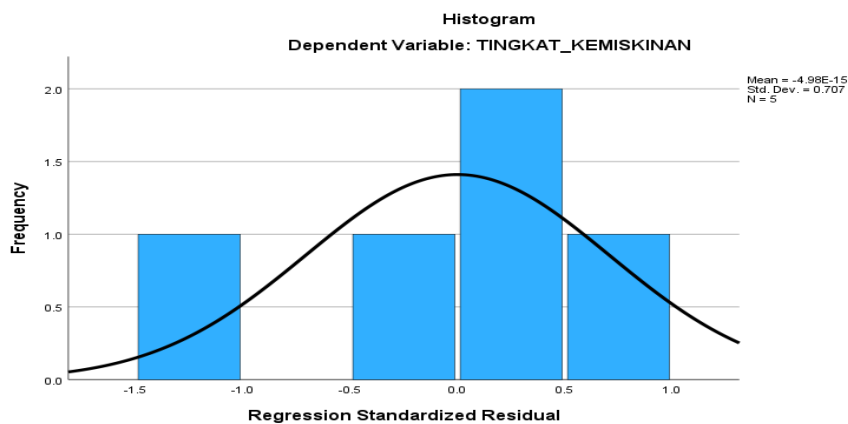
Tabel 1 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

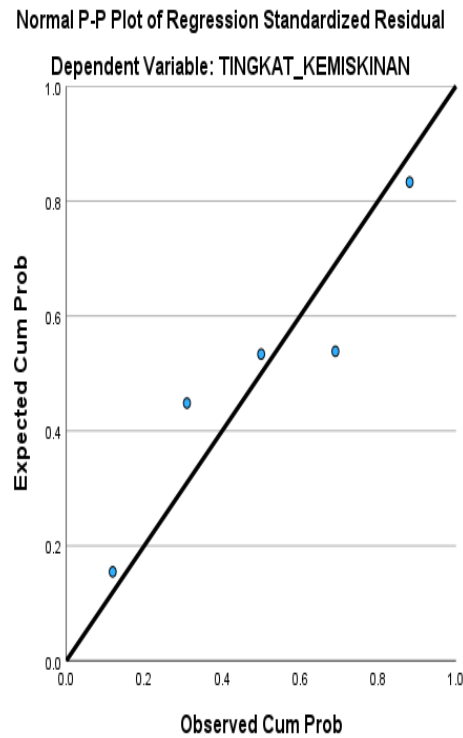
		Unstandardized Residual	
N		5	
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.10109013	
Most Extreme Differences	Absolute	.246	
	Positive	.246	
	Negative	-.227	
Test Statistic		.246	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.410	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.398
		Upper Bound	.423

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.
- e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Gambar 1 Uji Kolmogorov Sminrnov (Uji Normalitas)



Gambar 2 Histogram Tingkat Kemiskinan (Uji Normalitas)



Tabel 2 Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a										
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	13.626	1.271		10.719	.009						
	BELANJA_PEMERINTAH_DAERAH	-2.940E-10	.000	-.984	-4.152	.053	-.884	-.947	-.944	.920	1.087	
	PERTUMBUHAN_EKONOMI	-.112	.075	-.354	-1.492	.274	-.075	-.726	-.339	.920	1.087	

a. Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN

Seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0.10 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan.

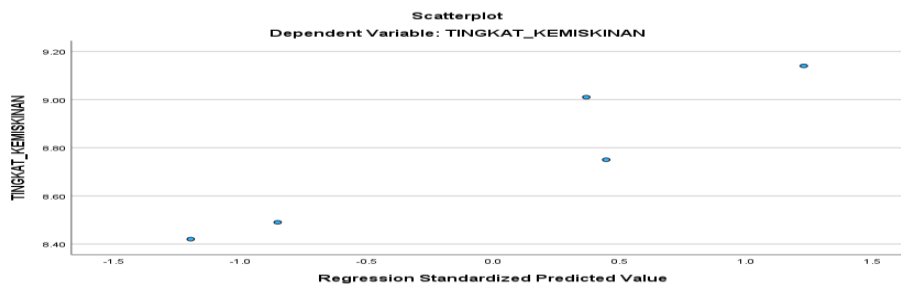
Tabel 3 Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.626	1.271		10.719	.009
	BELANJA_PEMERINTAH_DAERAH	-2.940E-10	.000	-.984	-4.152	.053
	PERTUMBUHAN_EKONOMI	-.112	.075	-.354	-1.492	.274

a. Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN



Gambar 3 Tabel Scatterplot (Uji Heteroskedastisitas)



Berdasarkan tabel diatas nilai signifikansi untuk belanja pemerintah daerah 0,053 alias lebih dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi 0.274 alias lebih dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas juga terlihat pada grafik Scatterplot yang menunjukkan bahwa residual data yang tidak membentuk pola.

Table 4 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics				Durbin-Watson
						F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.947 ^a	.897	.793	.14296	.897	8.675	2	2	.103	1.621

a. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN_EKONOMI, BELANJA_PEMERINTAH_DAERAH
b. Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN

DW = 1,621

Nilai DL = 1,5723 (diperoleh dari tabel DW)

Nilai DU = 1.7199 (diperoleh dari tabel DW)

4-DU (4-1,6148) = 2,3852

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1,621 dimana jika nilai $DU < DW < 4-DU$, maka tidak terjadi autokorelasi negatif atau positif. Maka dari hasil uji ini dinyatakan tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

Table 5 Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	13.626	1.271			10.719	.009
	BELANJA_PEMERINTAH_DAERAH	-2.940E-10	.000	-.984		-4.152	.053
	PERTUMBUHAN_EKONOMI	-.112	.075	-.354		-1.492	.274

a. Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN

Dari tabel diatas dapat dilihat model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$Y = 13.626 + (-2.94) X_1 + (-0.112) X_2$$

Berdasarkan tabel diatas nilai t

N = 5

k = 2

Maka diperoleh nilai $df = (0.05; 5-2-1)$ Hasilnya adalah 2, sehingga didapatkan nilai t tabel sebesar 2.91999 (diperoleh dari tabel t). Dari tabel diatas didapat nilai t hitung (-4.152) nilai ini lebih kecil dari nilai t tabel (2.91999). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun untuk variabel pertumbuhan ekonomi nilai t hitung (-1.492) kurang dari nilai t tabel (2.91999) yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Table 6 Uji f

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.355	2	.177	8.675	.103 ^b
	Residual	.041	2	.020		
	Total	.395	4			

a. Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN

b. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN_EKONOMI, BELANJA_PEMERINTAH_DAERAH

Nilai f tabel dapat diperoleh sebagai berikut.

$$Dk1 = (k-1) = (2-1) = 1$$

$$Dk2 = (n-k) = (5-2) = 3$$

F tabel = 9.55 (berasal dari tabel uji F)

Berdasarkan tabel yang menunjukkan nilai f hitung yaitu $8.675 < 9.55$ sehingga berdasarkan kriteria pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi tidak secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan tabel diatas nilai sig lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Tabel 7 Uji Determinasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F
1	.947 ^a	.897	.793	.14296	.897	

a. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN_EKONOMI, BELANJA_PEMERINTAH_DAER.

b. Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN

Berdasarkan tabel diatas nilai *R Square* 0,897 yang berarti dapat dibulatkan menjadi 90%, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan secara simultan sebesar 90%, sedangkan sisanya 10% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang belum diketahui.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Secara simultan, kedua variabel independen tersebut mampu menjelaskan variasi tingkat kemiskinan sebesar 90%, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,897. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perubahan tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh besarnya belanja pemerintah daerah dan kondisi pertumbuhan ekonomi, sementara sisanya sebesar 10% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, yang berarti peningkatan belanja pemerintah daerah mampu menurunkan angka kemiskinan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan, belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki kontribusi besar dalam menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan fiskal daerah melalui pengelolaan belanja pemerintah terbukti memiliki peran yang lebih dominan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara periode 2020–2024.



Saran

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disarankan meningkatkan efektivitas alokasi belanja daerah, terutama pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan. Selain itu, kebijakan pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan agar lebih inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode pengamatan dan memasukkan variabel lain seperti pengangguran, inflasi, dan ketimpangan pendapatan agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory Of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan.
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance In Theory And Practice* (Edisi Ke-5). New York: McGraw-Hill.
- Suryana. (2018). *Ekonomi pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Bandung: UPI Press.
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi: Teori pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). Jakarta.
- Ramadhan, M. R. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan Daerah*, 4(2), 67–78.
- Putri, D. A., & Harahap, R. H. (2020). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 5(1), 45–56.
- Siregar, O. K., & Ramadhan, P. A. (2020). Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 101–112.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (Edisi ke-13). Harlow: Pearson Education Limited.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (2020). Jakarta.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2021). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, A. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 85–96.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2021–2025). *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020–2024*. Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Purnomo, S. D., & Danuta, K. S. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 215–220.
- Siregar, R., & Lubis, I. (2022). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Regional*, 8(1), 23–34.
- Nasution, R. A., Silaban, S. J., & Humairah, Z. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 206–225.
- United Nations Development Programme. (2023). *Human Development Report 2023: Multidimensional Poverty Index*. New York: UNDP.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2024). *Profil kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Maret 2020–September 2024*. Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Data Keuangan Daerah: Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hanisah. (2024). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Barang Dan Jasa. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sekretari*, 1–11.

- Lubis, P. K., Sinaga, H. E., Izza, S. N., Siahaan, T., & Simangunsong, Y. S. (2024). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 722–735.
- Meiriza, M., Sembiring, R., Sitorus, T., Wardana, D., & Sakinah, F. (2024). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012–2022. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 7(1), 401–412.
- Alfath, N. D., Andiny, P., Rizal, Y., & Safuridar. (2025). Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3(1), 13–23.